



UPAYA INTENSIFIKASI PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN MARITIM DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL

Yunda Karyawanto, Ari Artanto
Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut
Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230
karyawantoyunda@gmail.com

Abstract *This study aims to understand the condition of global maritime defense and the efforts that can be made by Indonesia to build a strong and sustainable maritime defense industry. The defense industry requires different policies, regulations, actions and operations from conventional defense strategies. The maritime defense industry is an important key for Indonesia to further increase its strength to protect a sovereign Indonesian region. This study use a qualitative design perspective which is validated through a triangulation process. The results of this study indicate that the dynamics of global political conditions in various regions are very diverse and efforts to control the area of a particular country are important, so it is important for a major country Indonesia to build a maritime industrial defense to provide an adequate supply of defense and security tools in preparing themselves to face the threats. This is a special concern for the government to encourage the development of maritime defense in accordance with the interests of the times in the global era.*

Keywords: *Defence Industry, Maritim Defence, Global Era*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi pertahanan maritim global dan upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanan maritim yang kuat dan berkelanjutan. Industri pertahanan maritim memerlukan kebijakan, regulasi, tindakan, dan operasi yang berbeda dengan strategi pertahanan negara konvensional. Industri pertahanan maritim menjadi kunci penting bagi Indonesia untuk mendorong lebih jauh peningkatan kekuatan untuk menjaga Kawasan Indonesia yang berdaulat. Penelitian ini menggunakan perspektif desain kualitatif yang divalidasi melalui proses triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi dinamika perpolitikan global di berbagai Kawasan sangat beragam dan terdapat upaya untuk menguasai Kawasan dari suatu wilayah negara tertentu, sehingga penting untuk sebuah negara utamanya Indonesia dalam membangun industri pertahanan maritim untuk memberikan persediaan alat pertahanan dan keamanan yang memadai dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang ada. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan industri pertahanan maritim yang sesuai dengan kepentingan zaman di era global.

Kata Kunci: Industri Pertahanan, Pertahanan Maritim, Era Global

PENDAHULUAN

Pertahanan sebuah negara adalah bentuk kekuatan dan modal penting negara untuk menghadapi tantangan perang dan gejolak hubungan internasional lainnya. Baik dalam teori perang yang adil maupun hukum internasional mengakui bahwa pertahanan negara sendiri dan wilayahnya sebagai bentuk inti dari alasan membangun pertahanan yang adil. Suatu negara berhak atas keutuhan wilayah apabila memenuhi tiga syarat, yaitu 1) warga negaranya berhak menduduki wilayahnya; 2) skema hukumnya minimal adil, dan; 3) hubungan politik kerjasama yang mendukung institusinya secara wajar dan luas ditegaskan. Komponen tersebut sangat penting untuk diterapkan oleh seluruh negara sebagai Hal ini tidak terkecuali bagi bentuk tanggapnya negara Indonesia. Indonesia terkenal sebagai menghadapi tantangan global di masa negara yang memiliki wilayah maritim mendatang.

Dalam situasi global saat ini, bangsa-bangsa dihadapkan pada berbagai kondisi yang dapat mengganggu pertahanan negara, seperti kondisi lingkungan terutama perubahan iklim dunia dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Sejalan dengan hal tersebut, terjadi pula fenomena berkurangnya ketersediaan sumber daya alam seperti halnya cadangan dari minyak bumi. Persoalan tersebut kemudian memicu permasalahan yang terkait dengan keamanan di berbagai aspek kehidupan, seperti halnya keamanan terhadap



sumber daya alam dan kedaulatan wilayah. Jika kita melihat permasalahannya, kita dapat mengatakan konsep dan paradigma persaingan antar bangsa di dunia semakin tinggi akibat adanya kebutuhan akan pangan, kebutuhan untuk pengairan, irigasi, sumber daya mineral, dan berbagai macam kebutuhan yang ternyata pemerintah tidak kuat menghadapi hal ini akan menjadi salah satu indikator negara yang tergolong dalam kategori negara gagal (Larosa, 2017).

Hal ini tidak terkecuali bagi Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki wilayah maritim terbesar di dunia, kemudian hal ini juga mendorong Indonesia bisa menjadi kawasan industry maritim terbesar di dunia. Implementasi poros negara maritim merupakan konsep penting untuk memastikan komunikasi antara berbagai pulau di dalam kawasan satu dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan pelayaran dan perikanan, untuk meningkatkan pembangunan maritim, dan untuk fokus pada keamanan dan perlindungan kawasan perairan (Arto et.al, 2021). Pertahanan maritim di Indonesia menjadi hal penting sebagai upaya membangun konsepsi poros maritim kawasan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah misi kompleks untuk seluruh komponen negara yang terlibat. Pemahaman tentang poros pertahanan maritim dari berbagai pihak menjadi kunci utama bagi pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pertahanan di bidang maritim

Dalam menjaga pertahanan maritim, tentunya perlu untuk mengintensifkan proses pembangunan sarana dan prasarana bidang pertahanan yang diperlukan untuk membangun persenjataan dan alat lainnya yang membutuhkan kekuatan pertahanan mumpuni dan membutuhkan biaya minimum untuk melakukan operasi dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Sehingga membangun sistem pertahanan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menjadikan kekuatan pertahanan maritim lebih kuat dan berdaulat di seluruh kawasan negara (Octavian et.al, 2020). Strategi dalam meningkatkan sistem pertahanan maritim Indonesia perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan ancaman dan tantangan yang muncul akibat dinamika geopolitik, baik itu di tingkat global, kawasan regional, maupun di dalam negeri. Strategi pertahanan maritim yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama sinergitas dengan TNI AL yang berperan penting dalam mendukung strategi maritim nasional melalui upaya pembangunan industry pertahanan maritim di Indonesia.

Industri pertahanan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki setiap negara sebagai upaya mendorong peningkatan pertahanan negara melalui aspek-aspek pembangunan penting yang harus diselesaikan. Memiliki industri yang mandiri penting bagi setiap negara, terutama Indonesia karena diperlukan peralatan militer yang memadai untuk pertahanan negara. Impor alutsista dari negara lain akan menghabiskan sebagian besar anggaran negara, sehingga sangat penting untuk membangun industry pertahanan. Selain itu, penguatan pertahanan negara juga mempunyai fungsi memelihara kepentingan bangsa di luar negeri, memelihara keutuhan masyarakat di wilayah hukumnya dan turut serta dalam perdamaian dan keamanan. Hal ini menjadi kondisi relatif dari perlindungan kolektif dan individu para anggota. Masyarakat terhadap ancaman terhadap kelangsungan hidup dan otonominya. Untuk itu, dalam penulisan ini akan dibahas mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk membangun dan memperkuat industry pertahanan di bidang pertahanan maritim. Melalui kondisi yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

- 1) Bagaimana kondisi pertahanan maritim nasional dan global saat ini?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan Indonesia untuk membangun industry pertahanan maritim yang berdaulat dan berkelanjutan?

Tujuan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai potensi kekuatan militer yang dapat ditingkatkan melalui intensifikasi pembangunan industry pertahanan maritim.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Pembangunan industry pertahanan di berbagai negara utamanya Indonesia merupakan pembahasan penting dalam kajian untuk mendorong pertumbuhan kekuatan untuk menjaga kedaulatan nasional. Penelitian dari Hartati dan Muhammad (2014) dengan judul “Indonesian Defense Industry Model Concept: A Study Framework for Defense Industry Building” menjelaskan mengenai peranan layanan keamanan dan pertahanan negara dapat menjadi factor yang mendukung dan memperkuat keamanan nasional, terutama di bidang konstruksi dan teknologi industry pertahanan, termasuk peralatan bela negara. Selain teknologi, sumber daya manusia dan lingkungan merupakan komponen kekuatan keamanan nasional. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui keamanan Indonesia dan bagaimana menggunakan sumber daya pertahanan dan keamanan Indonesia secara efektif. Hasil penelitian menjelaskan terdapat tiga tipe utama, yaitu tipe industri keamanan, tipe desain niche, dan tipe rantai keamanan global. Bangsa Indonesia menggunakan sejumlah cara untuk mencapai swasembada kekuatan pertahanan. Untuk menyediakan perusahaan industry pertahanan keamanan, sistem perlindungan industri dan model teknologi yang ada perlu diperkenalkan dan dikembangkan.

Selanjutnya penelitian dari Nugraha (2017) yang berjudul “Indonesian Future Strategic Defense Planning” mengkaji bagaimana proses pelaksanaan kekuatan strategis militer Indonesia selama periode



dinamika kawasan Asia Tenggara (ASEAN) periode 2015 – 2020. Dinamika perkembangan negara-negara ASEAN terlihat kompleks dan dinamis, termasuk di kawasan negara Indonesia. Melindungi kawasan pertahanan Indonesia adalah persoalan yang menarik. Dari jenis penelitian ini, rencana strategis untuk pencegahan di masa depan dapat diidentifikasi dengan melihat model-model dinamis dari pertahanan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan perencanaan kebijakan pertahanan berperan penting dalam memperkuat sistem dan posisi pertahanan Indonesia. Indonesia juga perlu untuk memperkuat diplomasi keamanan dengan negara-negara Asia Tenggara maupun kawasan Asia lainnya dengan memperkuat basis pertahanan dan pengetahuan, seperti angkatan laut global untuk membentuk pasukan yang stabil (MEF). Salah satu yang dilakukan adalah dengan membuat dan memperkuat sistem industri pertahanan. Terakhir adalah penelitian dari Shiddiqy et.al (2019) yang berjudul “The Development of the Indonesian Defence Industry as a Consequence of Security Dilemma and Arms Race in the Southeast Asian Region”. Menjelaskan perkembangan industri pertahanan Indonesia sebagai akibat dari Dilema Keamanan dan kompetisi senjata yang terjadi di Asia Tenggara. Studi ini merupakan studi lapangan di PT. Pindad. Kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara relatif aman dan tidak pernah terjadi konfrontasi langsung atau head-to-head war antar negara di kawasan, bahkan terdapat konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara mulai gencar meningkatkan anggaran militer dan kemampuan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan dalam negeri, khususnya Indonesia. PT. Pindad sebagai salah satu industri pertahanan dalam negeri yang saat ini dapat memproduksi sebagian besar kebutuhan alutsista untuk pertahanan darat, seperti Senapan ringan dan berat, Rudal dan Mortar, Amunisi dan Roket, serta kendaraan taktis dan tempur seperti Panzer dan Tank yang dapat memenuhi kebutuhan TNI dan POLRI serta untuk kebutuhan Komersial.

Tiga penelitian terdahulu ini dapat menjelaskan bahwa pentingnya pembangunan industri pertahanan yang dapat mendukung penguatan strategi pertahanan nasional. Melalui Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, Indonesia diyakini dapat menyediakan fasilitas dan sarana yang mampu menunjang kekuatan pertahanan negara di tengah dinamika negara-negara di era global, utamanya negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Jika dilihat lebih lanjut, maka perlu adanya sebuah pembahasan mengenai upaya pertahanan di bidang maritim dan penguatan industrinya untuk menguatkan pertahanan nasional.

2. Industri Pertahanan

Industri Pertahanan adalah bentuk industri berjenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik dikelola secara mandiri oleh pemerintah maupun oleh kelompok yang ditunjuk pemerintah untuk produksi alat-alat keamanan dan pengamanan (Anugrah, 2017). Industri pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 16/2012 mengenai upaya pengembangan terhadap industri pertahanan nasional melalui pendayagunaan kegiatan industri dan pengolahan kekayaan terhadap peningkatan industri pertahanan negara. Tujuan dari penyelenggaraan industri pertahanan nasional adalah mendorong perwujudan pertahanan negara yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif (DPR RI, 2015). Hal ini dikarenakan industri pertahanan nasional menjadi sebuah usaha industri komersial yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, teknik, produksi, dan servis bahan, peralatan, dan fasilitas militer, termasuk Veteran Militer. Pengembangannya menjadi salah satu kunci untuk mendorong kekuatan militer dalam mencapai tujuan untuk kepentingan pertahanan negara yang berdaulat.

3. Pertahanan Maritim

Pengertian pertahanan dan keamanan maritim menurut Germond (2009) merupakan upaya pertahanan negara yang mencakup empat aspek penting, yaitu kebijakan, regulasi, tindakan, dan operasi (Germond & Smith, 2009). Sesuai dengan kebijakan, regulasi, tindakan dan operasi yang ada, pertahanan maritim masih menjadi upaya utama dalam menjaga kedaulatan negara secara keseluruhan. Pertahanan maritim merupakan sebuah istilah yang terkait dengan upaya untuk mengatasi ancaman yang berasal dari luar batas wilayah Indonesia di wilayah perairan (Kemhan RI, 2015). Pertahanan maritim lahir dari dinamika perkembangan politik internasional setelah berakhirnya Perang Dingin yang tidak lagi digambarkan sebagai 'hitam' melawan 'putih' atau 'baik' versus 'jahat'. Meski begitu, dinamika hubungan internasional dunia yang anarkis, menurut perspektif realis struktural, akan mendorong negara-negara untuk memprioritaskan kelangsungan hidup karena struktur dunia (Hidayat & Sidhha, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tinjauan pustaka dilakukan untuk validasi data melalui proses triangulasi. Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang di atas, desain penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan pemahaman terkait pentingnya intensifikasi pembangunan industri pertahanan maritim dalam menghadapi era global. Data yang digunakan dalam



penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui sumber literatur yang dapat mendukung pembahasan mengenai pembangunan industry pertahanan maritim. Data literatur didapatkan dari sumber buku, artikel jurnal, artikel *online*, dan sumber lainnya yang terpercaya validitas dan kredibilitasnya dalam menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Kondisi Pertahanan Maritim Nasional Dan Global Saat Ini

Tren yang menjadi dampak dari globalisasi sangat nyata adanya dan mempengaruhi kondisi maritim seluruh negara di dunia. Globalisasi telah mendorong transaksi barang dan jasa dalam paket yang lebih kecil yang disampaikan “just-in-time”. Hal ini telah meningkatkan kecepatan angkutan pengiriman, melalui jalur laut yang lebih cepat, menggunakan kapal kargo yang lebih kecil, dan selama dua dekade terakhir dibenarkan lebih cepat dibandingkan kapal kargo besar. Dalam ekonomi global, ekspedisi ini menawarkan keuntungan dari transportasi barang terintegrasi di semua moda. Analog dengan transportasi yang lebih seragam dari minyak mentah cair atau biji-bijian yang belum diproses, containerisasi menstandarisasi paket pengiriman, mengurangi biaya per unit pengangkutan sebagian besar barang jadi menjadikan pentingnya seluruh ekspedisi menggunakan jalur transportasi laut untuk melaksanakannya (Corbett et.al, 2010).

Hal yang tersebut di atas kemudian berkembang menjadi suatu hal yang kompleks bagi negara-negara di dunia untuk menciptakan keamanan maritim. Dinamika terhadap keamanan dan pertahanan maritim menjadi ajang perlombaan pembangunan industry senjata. Hal ini benar-benar terjadi di kawasan Asia Tenggara pasca era Perang Dingin. Setelah tidak adanya jaminan keamanan dari dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, semua negara di kawasan Asia Tenggara termotivasi untuk meningkatkan kemampuan militernya masing-masing (Shiddiqy et.al, 2019).

Peningkatan tersebut diwujudkan dengan meningkatkan anggaran militer, meningkatkan kerja sama pertahanan, melatih kembali personel militer, menambah dan memperbaharui alutsista, serta meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri masing-masing. Semua langkah ini diambil karena negara-negara di kawasan menyadari bahwa potensi konflik di masa depan akan sulit dihindari (Shiddiqy et.al, 2019).

Peningkatan kekuatan militer tentu saja merupakan hal yang sensitif karena dapat menimbulkan dilema keamanan bagi negara lain. Adagium dilema keamanan setidaknya menegaskan dua hal. Pertama, upaya peningkatan kekuatan militer suatu negara cenderung selalu diartikan sebagai kekuatan ofensif yang berkembang oleh negara lain, dan kedua, sulit untuk membedakan antara kekuatan defensif dan kekuatan ofensif. Hal ini dapat menyebabkan salah perhitungan, salah penilaian dan ketidakpercayaan.

Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika ada faktor pendorong ke arah itu. Artinya, peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor-faktor yang berakumulasi untuk bergerak ke arah itu. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kekuatan pendorongnya adalah ketegangan regional, sengketa perbatasan, perebutan sumber daya alam, beralihnya aktivitas militer AS ke Asia, dan meningkatnya kehadiran China di Laut China Selatan.

Dinamika di Laut China Selatan menjadi sebuah perbincangan yang tidak dapat dilepaskan dari pentingnya menjaga pertahanan maritim nasional, utamanya Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika lingkungan strategis di Laut China Selatan semakin memanas seiring China melakukan reklamasi di 7 titik pulau. Konflik kemudian meluas seiring sengketa perbatasan yang mulai mengarah ke wilayah laut Indonesia, ketika muncul isu klaim China atas Kepulauan Natuna dengan memasukkannya ke dalam sembilan garis putus-putus pada peta teritorial China sejak tahun 1974 (Nurmandi, 2019).

Laporan yang dirilis oleh Pentagon menyebutkan, sejak Desember 2013 China telah melakukan reklamasi sekitar 2.900 hektar lahan di Laut China Selatan, khususnya di Ferry Cross Reef. China kemudian terus melakukan pembangunan di kawasan itu, seperti pembangunan landasan pacu, rumah kaca, pengerahan 200 personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, serta pembangunan landasan yang dapat menampung H-6 jet pembom dan pesawat angkut militer Y-20 (Department of Defence USA, 2021).

Meski Indonesia bukan claimant state, tetapi Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah tegas terhadap dinamika China. Jika instrumen diplomatik tidak diterima oleh China, maka cara yang dilakukan adalah menghadapi militer dengan China. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus segera memetakan strategi militer dan pertahanan Indonesia dalam menghadapi konflik di Laut Cina Selatan. Telah diatur dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa Presiden bertanggung jawab merumuskan strategi pertahanan negara dalam menjadi acuan untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pertahanan negara oleh semua elemen kekuatan milik negara.

Melihat kondisi tersebut, sejak 25 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 sebagai pengganti PP No. 41/2010 tentang Kebijakan Pertahanan Umum. Kebijakan yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sesuai terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 (RPJMN 2015-2019) dan Rencana Strategis



(Renstra) Pertahanan periode 2015-2019 yang juga disesuaikan terhadap dinamika geopolitik dan pertahanan global di berbagai kawasan dunia.

Pelaksanaan strategi tersebut dapat dikaitkan terhadap dinamika perpolitikan dan keamanan negara di wilayah perbatasan, seperti upaya spionase, illegal trade, illegal fishing, dan lain sebagainya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Isu tersebut tergolong dalam isu makro, sehingga belum sepenuhnya mengacu pada sengketa perbatasan Laut China Selatan, khususnya isu klaim Kepulauan Natuna oleh China (Suhada, 2021).

Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi tersebut di atas mulai berubah. Perubahan-perubahan ini mengekspresikan dirinya dalam situasi baru layanan maritim nasional. Badan-badan operasional utama nasional, sebenarnya Coast Guard dan Angkatan Laut, telah dibatasi untuk bekerja sama lebih dekat, bahkan mereka mulai menyadari tugas-tugas yang bukan merupakan fungsinya sendiri. Fungsi yang paling berkarakteristik dalam hal ini adalah fungsi keamanan maritim yang selain Coast Guard atau dinas sejenis, sudah mulai direalisasikan juga oleh angkatan laut dan dinas operasional maritim lainnya. Alasan utama sekaligus titik balik dari perubahan di atas adalah pecahnya Perang Global Melawan Terorisme Dunia (Samy & Kusumadewi, 2021).

Upaya Yang Dapat Dilaksanakan Untuk Membangun Industry Pertahanan Maritim Yang Berdaulat Dan Berkelanjutan

Ketika berbicara mengenai pertahanan maritim, hal yang penting untuk negara maritim adalah kewajiban untuk mewujudkan tiga fungsi utama maritim: keselamatan, keamanan, dan pertahanan. Pertama, keselamatan jiwa dan harta benda di laut dari ancaman lingkungan dan operasional, serta keselamatan lingkungan laut dari pencemaran oleh kapal. Di tingkat nasional, keselamatan maritim dicapai sebagai hasil dari kerangka hukum keselamatan maritim yang ada; mengoperasikan infrastruktur navigasi global dan regional, tetapi terutama sebagai hasil dari pengoperasian layanan operasional maritim yang sangat khusus (Dyrcz *et.al*, 2009). Setiap negara maritim wajib memiliki berbagai jenis layanan operasional maritim. Hal yang paling penting dari mereka adalah:

- bantuan untuk layanan navigasi;
- layanan informasi hidrografi dan navigasi;
- jasa klasifikasi, survei, sertifikasi dan inspeksi kapal;
- Layanan Pencarian dan Penyelamatan (SAR);
- layanan perlindungan lingkungan laut, dll.

Hal ini mendorong untuk Indonesia menciptakan upaya pembangunan industry pertahanan dan keamanan maritim sebagai bentuk keamanan dari terorisme, pembajakan dan ancaman serupa, serta larangan efektif dari semua kegiatan terlarang di laut seperti pencemaran lingkungan laut; eksploitasi sumber daya laut secara tidak sah; Imigrasi ilegal; penyelundupan obat-obatan, orang, senjata dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk kegiatan teroris. Keamanan maritim dicapai terutama sebagai hasil dari operasi layanan maritim nasional yang baik.

Dalam konsep Poros Maritim Global, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia saat ini akan fokus pada kawasan laut dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya laut. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan wilayah pelayaran, pariwisata, hasil laut, kawasan konservasi, ruang pelatihan TNI AL dan segala potensi pemanfaatan laut. Hal ini kemudian menjadi motivasi pendorong yang dapat digunakan sebagai modal dalam pembangunan industry pertahanan di Indonesia.

Saat ini Pemerintah Indonesia mulai bergerak melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 97/2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019 memberikan arahan terhadap upaya pengembangan tingkat pertahanan militer yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan kekuatan minimum atau Minimum Essential Force (MEF) sebagai komponen kunci untuk menciptakan industry pertahanan. Lebih lanjut dalam Kerangka Strategis Kementerian Pertahanan dalam periode 2015-2019, dijelaskan bahwa pemerintah berupaya mewujudkan arah dan strategi terbaiknya, yaitu pendistribusian alutsista di bawah kebijakan moneter TNI dan pembangunan industri pertahanan yang berdaulat dan mandiri. Arah intelektual ini bertujuan untuk merumuskan kekuatan MEF menjadi kekuatan EF.

Terkait pembangunan prasarana dan sarana di bidang kelautan, Kementerian Pertahanan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata batas darat dan laut, terutama terhadap jalur kendali atau Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) dan Jalur Administratif (JA) wilayah perbatasan Kalimantan. Pembangunan fasilitas dan peralatan keamanan secara lengkap di kawasan perbatasan berhasil dan semua acara diperiksa kinerjanya 100% untuk memastikan tenggat waktu dapat dicapai serta anggaran terbaik.

Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI mengintensifkan pembangunan industri serta teknologi pertahanan melalui penetapan 71 Industri Pertahanan baik berbentuk BUMN maupun BUMS, hingga akhirnya di tahun ini terdapat 108 industri pertahanan yang siap membantu pasokan persenjataan dan kelengkapan pertahanan. Pembaharuan yang dilakukan adalah menggunakan sistem alaphankam yang dapat



diakses melalui perangkat gawai oleh setiap elemen masyarakat secara real-time dan terintegrasi dalam jaringan layanan Kementerian Pertahanan.

Upaya pembangunan dan optimalisasi industry pertahanan ini juga sejalan dengan upaya penguatan terhadap integrasi sistem sensorik dari Kawasan pulau terluar/terdepan Indonesia, yaitu pulau Natuna, Biak, Morotai, dan juga Merauke agar dapat dipantau oleh Puskodalops TNI. Hal ini kemudian mendorong optimalisasi dari pembangunan Coastal Defense dan Coastal Surveillance System di Kawasan strategis tersebut. Selain itu, industry pertahanan nasional juga aktif dalam upaya pembentukan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI sebagai bentuk sinergitas yang mampu digunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja TNI dengan para stakeholders, seperti Badan Keamanan Laut, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan laut dan lembaga terkait lainnya.

KESIMPULAN

Upaya membangun pertahanan yang kuat dan berdaulat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seluruh negara di era global. Hal ini dikarenakan berbagai dinamika yang terjadi pada akhir-akhir ini mendorong setiap negara untuk siap dalam menghadapi tantangan tersebut. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara salah satunya Indonesia, adalah dengan mengembangkan upaya untuk membangun industry pertahanan negara yang berdaulat.

Indonesia sebagai negara maritim tentunya perlu untuk memahami pentingnya memiliki industry pertahanan yang kuat. Hal ini dikarenakan dinamika geopolitik dan keamanan global saat ini dipicu oleh konflik Kawasan yang dimulai dari Kawasan maritim. Upaya-upaya yang dilakukan berbagai negara tentunya sangat berdampak bagi kestabilan pertahanan negara. Selain itu juga, Indonesia penting untuk memahami kompleksitas ancaman dari terorisme yang mengancam keamanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Melalui Rencana Strategis Kementerian Pertahanan (Renstra) diharapkan menjadi landasan untuk membangun industry pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y. (2022). Industri Pertahanan Indonesia Dikaitkan Situasi Dan Kondisi Peperangan Asimetris. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 3(6), 91-96. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i6.335>
- Anugrah, P. (2017). Analisa Pembangunan Alutsista Indonesia Menuju Kemandirian Pada Tahun 2045 Untuk kepentingan Pertahanan Di Bidang Maritim. 10.13140/RG.2.2.35794.45766.
- Chowdhury, S., Dey, P., Joel-Edgar, S., Bhattacharya, S., Rodriguez-Espindola, O., Abadie, A., & Truong, L. (2022). Unlocking the value of artificial intelligence in human resource management through AI capability framework. *Human Resource Management Review*, 100899.
- Corbett, J., Winebrake, J., Endresen, Department of Defence USA. (2021).
- Dyrcz, C., Morgaś, W., & Urbański, J. (2009). Maritime safety, security and defense of today and tomorrow. *Annual of Navigation*, 15.
- Esangbedo, M. O., Bai, S., Mirjalili, S., & Wang, Z. (2021). Evaluation of human resource information systems using grey ordinal pairwise comparison MCDM methods. *Expert Systems with Applications*, 182, 115151.
- Germond, B., & Smith, M.E. (2009). ReThinking European Security Interests and the ESDP: Explaining the EU's Anti-Piracy Operation. *Contemporary Security Policy*. <https://doi.org/10.1080/13523260.903.327741>
- Hartati, S. & Muhammad, A. (2014). Indonesian Defense Industry Model Concept: A Study Framework for Defense Industry Building. *Journal of Advanced Management Science*, 2(4). 260-266.
- Hidayat, S. & Sidhha, A. (2018). Indonesia's Maritime Defence Paradigm Sine Qua Non Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Pertahanan*, 4(3). 136-144.
- Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*. A Report to Congress Pursuant to the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2000.
- Nugraha, M. (2017). Indonesian Future Strategic Defense Planning. *Jurnal Pertahanan*, 3(3). 207-220.
- Nurmandi, A. (2019). Indonesia's swift securitization of the Natuna Islands how Jakarta countered China's claims in the South China Sea. *Asian Journal of Political Science*. 27. 1-25. 10.1080/02185377.2019.1590724.
- Ø., Eide, M., Dalsøren, S., Isaksen, I., & Sjørgård, E. (2010). International Maritime Shipping: The Impact of Globalisation on Activity Levels. *OECD Report*. 10.1787/9789264072916-5-en.



- Samy, M. & Kusumadewi, J.A. (2021). Diplomasi Pertahanan Militer Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional: Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1. 45-62
- Shiddiqy, M.A.A., Bainus, A., Sumadinata, W.S., & Sudirman, A. (2019). The Development of the Indonesian Defence Industry as a Consequence of Security Dilemma and Arms Race in the Southeast Asian Region. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(5). 214-226.
- Suhada, C. & Sudirman. (2021). Conflicts Between Chinese And Indonesia In North Natuna Sea. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*. 17. 2147-2157.